

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi&Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi II cet I Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Azwar, Saefudin, 2010, *Metode Penelitian*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 2013, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Insignia Strat, Yogyakarta.
- Ekatjhyana, Widodo, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukhtie, 2006, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press & Citra Media, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Penegertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Problema Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, & R, Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, Yogyakarta
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Buku I), Edisi Revisi, Kanisius, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Mahfud, Moh. M.D., 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

- _____, 2010. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*. Kerjasama Pusat Studi Hukum FH UII & Gama Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapan oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ranggawidjaja, Rosidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1996, "*Prasaran*" *Seminar ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Mas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Soemarjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tatang M. Amirin, 1986, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thalhah & Sobirin Malian, 2011, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Trijono, Rachmat, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Penegtaahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinarti, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal&HasilPenelitian:

A.A. Oka Mahendra, S.H, 2013, “Harmonisasi dan sikronisasi rancangan undang-undang dalam rangka pementapan dan pembulatan konsepsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

A. Hamid S. Attamimi, “Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman”, *Pidato*, disampaikan pada upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, pada 25 April 1992.

Ismail Suny, “Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi”, *Pidato*, di hadapan Seminar PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) yang dianggap beliau pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *makalah*, Disampaikan pada acara Seminar “menyoal moral penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

Peraturan Perundang-undangan & Putusan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254).

Kamus:

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sumber Internet:

Jimly Asshiddiqie, membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis, <http://www.google.co.id/search?q=negara+hukum+menurut+jimlytie=utf-8&oeq=utf-8&aq=ttrls=org.mozilla:en-US:official+client=firefox-a>

Muhammad Sapta Murti, Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara R.I. *Power Point Permasalahan dalam Harmonisasi Secara Vertikal Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/id/files/doc/>

[Http:// Hukum online.com](http://Hukumonline.com)